

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UPAYA MEDIASI PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. FREEPORT
INDONESIA**

**Oleh :
Pramesti Tri Septi Anta
E1A019073**

ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja oleh karyawan di sebuah perusahaan sering kali terjadi, khususnya PHK di PT. Freeport Indonesia. Seringkali perlindungan hukum dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja tidak terlaksana dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi pihak pengusaha tidak memberi pemberitahuan terlebih dahulu mengenai pemutusan hubungan kerja kepada pihak pekerja.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi kepustakaan. Penelitian ini diuraikan dengan menggunakan teks naratif yang dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian PHK di PT. Freeport Indonesia perlu melalui tahapan perundingan bipartit terlebih dahulu sebelum adanya mediasi. Setelah dilakukan perundingan bipartit maka dianjurkan melakukan mediasi. Mediasi menghasilkan 2 hasil yaitu sepakat dan tidak sepakat. Apabila sepakat dibuat perjanjian bersama. Apabila tidak sepakat maka mediator membuat anjuran mediator yang bisa disetujui maupun tidak disetujui oleh masing-masing pihak. Apabila setuju maka dibuat perjanjian bersama. Apabila tidak disetujui maka mediator menyerahkan kepada para pihak untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya. Perlindungan hukum bagi para pihak didasarkan pada indikator secara prosedural/mekanisme dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004. Indikator secara substansi didasarkan pada Pasal 158 ayat 2 dan Pasal 155 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003, dengan memberikan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban yang dirugikan oleh pekerja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial

**LEGAL PROTECTION IN MEDIATION EFFORTS TO COMPLETION OF
TERMINATION OF EMPLOMENT AT PT. FREEPORT INDONESIA**

By :
Pramesti Tri Septi Anta
E1A019073

ABSTRACT

Termination of employment by employees in a company often occurs, especially layoffs at PT. Free port Indonesia. Often legal protection and settlement of termination of employment are not carried out properly. The problem that often occurs is that the employer does not provide prior notification regarding termination of employment to the worker.

The research method used in this study uses a normative juridical method with prescriptive research specifications. The data source used is secondary data in the form of literature studies. This study is described using narrative texts which are analyzed using qualitative normative methods.

The results of the research and discussion show that the settlement of layoffs at PT. Freeport Indonesia needs to go through the stages of bipartite negotiations before mediation takes place. After bipartite negotiations, mediation is recommended. Mediation produces 2 results, namely agreement and disagreement. If agreed, a collective agreement is made. If you don't agree, the mediator makes a mediator recommendation which can be approved or not approved by each party. If you agree, a collective agreement is made. If it is not agreed, the mediator will hand over to the parties to take another settlement path. Legal protection for the parties is based on procedural indicators/mechanisms in resolving industrial relations disputes based on Article 30 of Law Number 5 of 2004. Substantial indicators are based on Article 158 paragraph 2 and Article 155 paragraph 3 of Law Number 13 of 2003, by providing legal protection in the form of fulfilling the rights and obligations that are harmed by workers..

Keywords : *Legal Protection, Work Termination, Industrial Relations Disputes*